

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja dan keberlanjutan pembangunan suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kuantitas *output* barang dan jasa, tetapi juga kualitas pembangunan seperti efisiensi distribusi sumber daya, perbaikan teknologi, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam konteks makro ekonomi, proses ini mencerminkan dinamika ekonomi yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Ukuran yang paling umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah. PDRB menggambarkan nilai tambah bruto dari seluruh unit usaha yang beroperasi di wilayah tertentu dalam satu periode. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi perumus kebijakan untuk menyusun strategi pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis data.

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan interaksi antara faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi dalam menciptakan peningkatan output secara berkelanjutan. Teori ini bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat dalam proses pertumbuhan dan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan. Seiring waktu, teori pertumbuhan juga

telah berkembang untuk mengakomodasi faktor institusional, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia sebagai penentu utama pertumbuhan jangka panjang. Dalam praktiknya, teori-teori tersebut membantu menganalisis kekuatan dan kelemahan struktur ekonomi suatu wilayah. Melalui pendekatan ini, perencana pembangunan dapat menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap tantangan global dan perubahan struktural.

PDRB digunakan sebagai indikator utama dalam menilai performa ekonomi suatu wilayah karena mencerminkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap total output regional. Nilai tambah yang dihitung dalam PDRB menunjukkan kontribusi bersih setiap unit ekonomi setelah dikurangi konsumsi antara. Indikator ini penting dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan penentuan sektor prioritas. PDRB juga menjadi acuan dalam menilai ketahanan ekonomi lokal dan daya beli masyarakat, meskipun tidak secara langsung mencerminkan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, meski angka PDRB tinggi, perlu analisis lanjutan mengenai seberapa besar pertumbuhan tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami peran dan keterbatasan PDRB, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan pembangunan yang lebih holistik.

Dalam pengukuran PDRB, terdapat dua pendekatan berdasarkan harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai output berdasarkan harga pasar saat itu, sehingga mencerminkan kondisi nominal perekonomian. Sebaliknya, PDRB atas dasar

harga konstan menghitung nilai output menggunakan harga pada tahun dasar tertentu, sehingga mencerminkan pertumbuhan riil tanpa pengaruh inflasi. Keduanya digunakan secara simultan untuk memahami dinamika ekonomi secara menyeluruh, baik dari sisi volume produksi maupun perubahan struktur sektoral. Harga berlaku lebih relevan untuk keperluan evaluasi sektoral dan alokasi anggaran, sedangkan harga konstan digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi secara riil.

Penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama: produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Pendekatan produksi menghitung total nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. Ini membantu dalam mengidentifikasi sektor unggulan daerah dan merancang strategi pembangunan sektoral. Pendekatan pendapatan menghitung akumulasi balas jasa terhadap faktor produksi, termasuk upah tenaga kerja, sewa lahan, bunga modal, dan keuntungan pengusaha. Data ini berguna untuk menilai distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi. Sedangkan pendekatan pengeluaran mencakup konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan perdagangan luar negeri. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi untuk membentuk gambaran utuh aktivitas ekonomi regional.

Ketiga pendekatan tersebut secara teoritis menghasilkan angka PDRB yang sama, karena menggambarkan siklus ekonomi yang utuh produksi menciptakan pendapatan, yang kemudian digunakan untuk pengeluaran. Dalam sistem neraca nasional, hubungan ini dikenal sebagai identitas tiga sisi

atau *triple identity*. Meskipun dalam praktiknya terdapat selisih kecil karena keterbatasan data atau kendala teknis, ketiganya tetap digunakan secara paralel untuk meningkatkan keandalan analisis. Nilai PDRB yang dihasilkan dikenal sebagai PDRB atas dasar harga pasar karena telah memperhitungkan pajak tak langsung dikurangi subsidi.

2.2 Konsep Transformasi Struktur

Transformasi struktur ekonomi merupakan proses perubahan komposisi kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari waktu ke waktu. Secara umum, transformasi ini menunjukkan pergeseran dari dominasi sektor primer seperti pertanian menuju sektor sekunder seperti industri, dan akhirnya ke sektor tersier seperti jasa. Pergeseran ini menandakan adanya modernisasi dalam sistem produksi dan peningkatan efisiensi dalam perekonomian suatu daerah. Transformasi struktur juga mencerminkan perubahan dalam pola kerja masyarakat, dari yang awalnya berbasis tenaga fisik menuju penggunaan teknologi dan pengetahuan. Proses ini biasanya dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dukungan kebijakan yang mendorong diversifikasi ekonomi.

Dalam sejarah pembangunan ekonomi, negara-negara yang berhasil mencapai status ekonomi maju selalu melewati proses transformasi struktural ini. Perubahan struktur ekonomi menjadi penting karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas, kesempatan kerja, dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Ketika sektor jasa dan industri mulai berkembang, lapangan kerja baru tercipta dengan nilai tambah yang lebih tinggi dibanding sektor tradisional. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam mengarahkan dan mempercepat proses transformasi melalui investasi infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Tanpa intervensi yang tepat, transformasi dapat berjalan lambat dan menimbulkan ketimpangan antarwilayah.

Ciri utama dari transformasi struktur ekonomi adalah menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB secara relatif, meskipun secara absolut nilainya bisa tetap meningkat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dan jasa terhadap perekonomian. Perubahan ini biasanya diikuti oleh pergeseran tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dampaknya adalah terjadinya urbanisasi, meningkatnya produktivitas tenaga kerja, serta perubahan gaya hidup masyarakat. Sektor-sektor modern cenderung menawarkan pendapatan yang lebih tinggi, mendorong peningkatan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Transformasi tidak selalu berjalan mulus dan merata di semua daerah. Beberapa wilayah masih bergantung pada sektor tradisional karena keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, atau kurangnya akses terhadap modal dan pasar. Ketimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan dan menimbulkan kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, penting bagi

pemerintah daerah untuk mengidentifikasi sektor potensial dan merancang kebijakan sektoral yang mampu mempercepat transformasi.

Transformasi struktur ekonomi juga berdampak pada perubahan struktur sosial masyarakat. Ketika tenaga kerja berpindah ke sektor modern, tuntutan terhadap keterampilan dan pendidikan meningkat. Hal ini mendorong perubahan dalam sistem pendidikan, pelatihan kerja, serta nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Mobilitas sosial meningkat, namun juga bisa menimbulkan ketimpangan baru jika tidak diimbangi dengan pemerataan akses terhadap peluang ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian integral dari strategi transformasi struktur ekonomi.

Transformasi juga berdampak pada pola konsumsi dan produksi dalam perekonomian daerah. Masyarakat cenderung mengkonsumsi lebih banyak produk dan layanan modern, sementara sektor produksi mengadopsi teknologi yang lebih efisien. Hal ini mendorong terjadinya inovasi, peningkatan produktivitas, dan penciptaan nilai tambah yang lebih besar. Di sisi lain, transformasi juga membawa risiko terhadap keberlanjutan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu, transformasi ekonomi harus dibarengi dengan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial.

2.3 Sektor Basis Ekonomi

Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan merupakan pendorong utama dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah, karena sektor ini tidak hanya mampu berkembang secara mandiri, tetapi juga mendorong sektor-sektor lain untuk turut berkembang. Keunggulan tersebut dapat dilihat dari dua sisi yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif berakar pada potensi sumber daya alam, geografis, maupun kultural yang dimiliki oleh suatu daerah, yang memberikan nilai lebih dibandingkan daerah lain. Sementara itu, keunggulan kompetitif lebih menekankan pada kemampuan suatu daerah dalam menciptakan efisiensi, inovasi, dan daya saing terhadap produk sejenis dari luar daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, sektor unggulan ini perlu dipetakan secara akurat dan dikembangkan secara berkelanjutan agar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi regional yang terintegrasi dan inklusif.

Dalam konteks era globalisasi dan perdagangan bebas, perhatian para perencana pembangunan daerah mulai bergeser dari dominasi keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam pasar terbuka, kemampuan bersaing menjadi faktor penentu dalam mempertahankan eksistensi suatu sektor ekonomi (Ekonomi & Jambi, 2019). Keunggulan kompetitif merefleksikan kemampuan suatu daerah untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan menawarkan produk yang memiliki kualitas, harga, dan nilai tambah yang kompetitif.

Jika suatu sektor sudah memiliki keunggulan komparatif misalnya karena melimpahnya sumber daya alam, letak geografis yang strategis, atau

ketersediaan tenaga kerja terampil maka strategi pembangunan yang diarahkan untuk mendukung sektor tersebut akan memperbesar peluang terciptanya keunggulan kompetitif. Strategi tersebut mencakup pembangunan infrastruktur pendukung, penguatan kapasitas SDM, pemberian insentif kebijakan, hingga pengembangan teknologi produksi yang efisien. Apabila semua hal tersebut dijalankan dengan efektif, maka sektor tersebut tidak hanya menjadi unggulan secara lokal, tetapi juga mampu bersaing dalam skala nasional bahkan global. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang mampu menggabungkan keunggulan komparatif dan kompetitif akan menghasilkan dampak berganda (*multiplier effect*) yang signifikan, termasuk dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru, serta penguatan struktur ekonomi daerah secara keseluruhan. Kebijakan daerah yang tepat akan mempercepat proses ini, dengan menjadikan sektor unggulan sebagai pusat gravitasi dari pembangunan ekonomi lokal.

Dalam pembentukan keunggulan daerah, beberapa faktor utama sangat berpengaruh terhadap kemampuan sektor untuk menjadi unggulan. Kombinasi faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya alam, tingkat kemajuan teknologi, aksesibilitas wilayah, kapasitas pasar, keberadaan sentra produksi, ketersediaan dan kualitas tenaga kerja, karakteristik masyarakat, serta peran kebijakan pemerintah, semuanya memiliki kontribusi besar dalam menciptakan keunggulan tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan dalam membangun sektor unggulan tidak dapat dilepaskan dari upaya sistemik untuk meningkatkan kualitas semua faktor tersebut secara simultan. Hal ini

menuntut keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat lokal, dalam satu sinergi pembangunan yang berorientasi pada pencapaian daya saing wilayah. Peningkatan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor potensial daerah (Jurnal & Hatta, 2021).

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan suatu wilayah. Pertumbuhan tersebut sangat bergantung pada seberapa baik suatu daerah mampu mengeksplorasi keunggulan alamiah yang dimilikinya, serta mendorong ekspansi basis ekspor. Teori basis ekonomi menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah ditentukan oleh permintaan eksternal terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Oleh karena itu, pembangunan sektor ekspor menjadi agenda strategis yang tidak hanya berdampak langsung pada perekonomian lokal, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan. Daerah yang mampu memanfaatkan keunggulan sumber daya lokalnya untuk mengembangkan sektor ekspor akan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika global.

Dalam kerangka analisis ekonomi regional, aktivitas ekonomi dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sektor basis dan sektor non-basis. Sektor basis mencakup kegiatan yang orientasinya untuk ekspor ke luar wilayah, sementara sektor non-basis lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik masyarakat lokal. Pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas basis

ini akan disalurkan kembali ke sektor non-basis melalui konsumsi dan investasi lokal, sehingga menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, perkembangan ekspor akan menciptakan permintaan baru terhadap produk industri lokal yang mendukung rantai produksi barang ekspor. Dalam konteks ini, penguatan sektor ekspor tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dalam bentuk devisa dan peningkatan pendapatan, tetapi juga menciptakan permintaan terhadap teknologi, jasa, serta inovasi produksi (Tje & Dima, 2022).

Untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis atau unggulan di suatu wilayah, salah satu metode yang banyak digunakan adalah *Location Quotient* (LQ). Teknik ini memungkinkan analisis sejauh mana suatu sektor ekonomi menjadi spesialisasi daerah dibandingkan dengan wilayah referensi, seperti provinsi atau nasional. Penggunaan LQ dapat berbasis pada tenaga kerja atau nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan hasilnya menunjukkan apakah suatu sektor termasuk basis (nilai $LQ > 1$), non-basis (nilai $LQ < 1$), atau netral (nilai $LQ = 1$). Dengan menggunakan LQ, perencanaan pembangunan daerah dapat menyusun strategi pengembangan sektoral secara lebih fokus dan berbasis data, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan potensi nyata daerah. Identifikasi sektor unggulan melalui LQ juga membantu daerah dalam menyusun prioritas program pembangunan yang bersifat produktif dan berkelanjutan, sekaligus mendorong koordinasi lintas sektor guna memperkuat ekosistem ekonomi lokal secara komprehensif.

2.4 Pergeseran Struktur Ekonomi

Teori-teori perubahan struktural (*structural-change theory*) memberikan fokus utama pada transformasi menyeluruh dalam struktur ekonomi suatu negara, dari yang semula didominasi oleh sektor pertanian tradisional menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks dan modern, yang mencakup sektor industri manufaktur serta sektor jasa yang tangguh. Transformasi ini dianggap sebagai kunci dalam proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena dengan berkembangnya sektor industri dan jasa, maka diversifikasi kegiatan ekonomi menjadi lebih luas dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pendekatan ini secara konseptual menempatkan pembangunan sebagai proses bertahap yang berfokus pada perubahan sektor-sektor utama perekonomian.

Perubahan struktur ekonomi daerah dalam jangka panjang merupakan bagian dari dinamika pembangunan nasional, di mana terjadi pergeseran kontribusi sektor ekonomi terhadap PDB. Daerah-daerah yang semula menggantungkan ekonomi pada sektor pertanian perlahan mengalami transformasi menuju sektor industri dan jasa. Perubahan ini dapat dilihat dari meningkatnya kawasan-kawasan industri baru di pinggiran kota, pertumbuhan sektor pariwisata, dan munculnya pusat-pusat perdagangan serta layanan publik. Di sisi lain, perubahan ini menyebabkan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa yang lebih menjanjikan dari segi penghasilan dan jaminan sosial. Namun, perpindahan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti pengangguran terselubung

di kota, kekurangan tenaga kerja pertanian, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan struktural dalam suatu daerah sangat beragam dan saling berkaitan, mulai dari ketersediaan sumber daya alam hingga kualitas sumber daya manusia. Daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang tinggi cenderung lebih cepat mengalami transformasi ekonomi karena daya tarik investasi yang tinggi di sektor industri ekstraktif maupun manufaktur. Namun demikian, transformasi yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, terutama dalam penguasaan teknologi, produktivitas kerja, dan inovasi. Selain itu, sarana dan prasarana seperti infrastruktur jalan, pelabuhan, dan sistem logistik memainkan peran penting dalam memperlancar mobilitas ekonomi antarwilayah. Modal dan investasi, baik dari dalam negeri maupun asing, juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses transformasi ekonomi daerah. Jika semua faktor ini dapat dikelola secara optimal, maka perubahan struktur ekonomi tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai dinamika sektor basis dan pergeseran struktur ekonomi di berbagai daerah di Indonesia dengan pendekatan yang beragam. Salah satunya adalah penelitian oleh Saerafi, (2005) yang mengkaji pertumbuhan ekonomi serta potensi

pengembangan sektoral di Kabupaten Semarang melalui pendekatan model basis ekonomi dan analisis SWOT. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan dan jasa merupakan sektor strategis yang mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Selain itu, ia juga menemukan bahwa interaksi ekonomi Kabupaten Semarang paling kuat terjadi dengan daerah-daerah tetangga seperti Kota Semarang, Demak, Salatiga, Kendal, dan Grobogan. Keterkaitan ini terutama didorong oleh kedekatan geografis dan kepadatan penduduk antarwilayah. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di lapangan, strategi pengembangan industri pengolahan yang diangkat mencakup sektor tekstil, garmen, serta pemanfaatan potensi lokal seperti eceng gondok.

Studi serupa dilakukan oleh Fachrurrazy, (2009) yang meneliti sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan pendekatan sektor pembentuk PDRB. Penelitiannya menunjukkan bahwa sektor pertanian dan sektor pengangkutan serta komunikasi tergolong sebagai sektor yang tumbuh pesat. Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ), sektor basis daerah tersebut meliputi pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, serta pengangkutan dan komunikasi. Melalui analisis shift share, sektor yang bersifat kompetitif antara lain sektor pertanian, bangunan dan konstruksi, serta lembaga keuangan. Penelitian ini secara menyeluruh mengidentifikasi sektor pertanian sebagai sektor unggulan karena memenuhi kriteria sebagai sektor basis, tumbuh pesat, dan memiliki daya saing tinggi. Sub sektor

pertanian yang direkomendasikan untuk dikembangkan meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Selanjutnya, Marhayanie, (2003) dalam penelitiannya berjudul *Identifikasi Sektor Ekonomi Potensial dalam Perencanaan Pembangunan Kota Medan* menggunakan analisis kontribusi sektoral, keterkaitan antarsektor, dan angka pengganda (*multiplier effect*) untuk menentukan sektor prioritas pembangunan. Hasil kajiannya menegaskan bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor ekonomi yang paling potensial untuk mendorong pertumbuhan Kota Medan. Temuan ini mendukung pandangan bahwa sektor industri tidak hanya memiliki kontribusi besar terhadap PDRB, tetapi juga mampu menciptakan efek pengganda ekonomi yang luas bagi sektor lain. Hal ini memperkuat urgensi pemetaan dan pengembangan sektor industri dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, terutama di wilayah perkotaan yang tengah mengalami transformasi struktural ekonomi.

Supangkat, (2002) mengangkat tema tentang penentuan sektor prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Asahan dengan menggunakan pendekatan sektor pembentuk PDRB. Dalam penelitiannya, sektor pertanian dan industri pengolahan dinyatakan sebagai sektor yang layak dijadikan prioritas pembangunan. Sub sektor yang secara khusus diidentifikasi meliputi perkebunan, perikanan, dan industri besar-menengah. Hasil ini kembali menegaskan pentingnya peran sektor primer dan sekunder dalam memacu pembangunan daerah, terutama jika ditopang oleh sumber daya lokal yang melimpah dan strategi pembangunan yang tepat sasaran.

Meskipun studi-studi tersebut memberikan kontribusi penting dalam literatur mengenai sektor basis dan perubahan struktur ekonomi, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan dalam konteks sebelum terjadinya pandemi global COVID-19. Padahal, pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika ekonomi regional, termasuk pergeseran sektor basis dan non-basis, perubahan pola konsumsi, serta gangguan terhadap rantai pasok produksi dan distribusi. Kondisi ini memunculkan kesenjangan (gap) penelitian, yaitu kurangnya kajian empiris yang fokus menganalisis dampak pandemi terhadap perubahan struktur ekonomi di tingkat kabupaten, terutama di daerah seperti Kabupaten Bantul, yang secara geografis dekat dengan kota besar seperti Yogyakarta dan memiliki karakteristik ekonomi yang unik.

Dengan demikian, penelitian yang mengangkat tema Analisis Perubahan Struktur Basis Ekonomi di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca COVID-19 Tahun 2020 menjadi relevan dan memiliki novelty yang kuat. Penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan studi pascapandemi dalam konteks perubahan struktural ekonomi di tingkat daerah, tetapi juga menawarkan kontribusi akademik berupa pemetaan sektor basis dan non-basis secara mutakhir menggunakan pendekatan kuantitatif seperti analisis *Location Quotient* dan *Shift Share*. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal yang adaptif terhadap dinamika global. Dengan latar belakang Kabupaten Bantul

yang memiliki perpaduan antara sektor agraris, pariwisata, dan industri kreatif, penelitian ini berpeluang menjadi acuan dalam membentuk arah kebijakan ekonomi daerah yang resilien dan inklusif di era pasca pandemi.

